

BAB I PEDAHULUAN

Pada bagian ini akan dipaparkan kemengapaan penelitian ini dilakukan dengan mengetengahkan 1) latar belakang permasalahan yang diawali gambaran fenomena konflik mahasiswa di perguruan tinggi, urgensi pendidikan kedamaian sebagai solusi dengan mengintegrasikan melalui pendidikan kewarganegaraan (mata kuliah Konsep Dasar PKn) secara kurikuler, kemudian 2) mendeskripsikan fokus masalah, 3) merumuskan masalah penelitian, 4) menentukan tujuan penelitian serta 5) manfaat penelitian baik secara teoritis, praktis, aksi sosial, maupun dalam konteks kebijakan.

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup secara berkelompok dan membutuhkan satu sama lain. Interaksi antar sesama menjadi suatu keniscayaan. Namun dalam berinteraksi ada dua hal yang akan terjadi yaitu terjadinya kerjasama (*kooperatif*) dan juga persaingan (*kompetitif*). Di Era global saat ini setiap negara saling ketergantungan satu sama lain. Kerjasama suatu negara dengan negara lainnya merupakan keniscayaan. Begitu pula terhadap upaya menciptakan perdamaian dunia. Setiap negara memiliki *national interest* untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan kebebasan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya kerjasama yang akan terjadi tapi dapat memicu konflik dan ketegangan.

Hingga saat ini konflik dan kekerasan di dunia masih terjadi. Beberapa persoalan bernuanasa rivalitas yang dipicu oleh *show of force* negara adidaya dengan negara berkembang dan negara miskin masih menjadi polimik bagi tatanan dunia yang aman dan damai. Ada beberapa hal yang dapat memicu seperti adanya hasrat bagi setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga mengekspansi sumber daya alam dan atau perekonomian negara lain contohnya perang teluk, invasi Amerika Serikat terhadap Irak, afghanistan, konflik di kepulauan Spratly dan patroli tentara Amerika Serikat ke beberapa negara yang memiliki sumber alam yang melimpah. Sumber konflik lain sering

dipicu oleh persaingan untuk membuktikan bahwa suatu negara lebih kuat dengan negara lain. Hal ini dapat di buktikan dari berbagai upaya sebagian negara mempercanggih alat perang hingga pembuatan nuklir yang merupakan masalah pelik bagi keamanan dunia saat ini. Hal lain jadi pemicu konflik di dunia adalah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman suatu negara terhadap negara lainnya. Isu tentang terorisme dan gerakan radikalisme masih menjadi momok bagi negara-negara mayoritas Islam sehingga menjadi pemicu konflik dan peperangan (Kartadinata dkk, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa ungkapan *si vis pacem para bellum* (bila mau berdamai maka bersiplah untuk berperang) masih relevan saat ini.

Pada konteks kekinian, perang yang dimaksud bukan hanya *hard power* tetapi juga *soft power* (Nye, 2005). Hal ini terjadi karena setiap negara mencoba untuk melakukan kerjasama dengan cara berdiplomasi. Barston menjelaskan bahwa jalur ekonomi dan perdagangan sesungguhnya bisa digunakan sebagai instrumen untuk mempererat hubungan antar negara, selain penggunaan isu keamanan dan jalur politik tentunya (Barston, 1997, hal.184). *Modern diplomacy* atau diplomasi yang baru menekankan adanya keterbukaan. Bicara mengenai diplomasi, berarti membicarakan tentang *national interest*, bagaimana mendapatkan kepentingan nasional dengan meningkatkan *soft power* dan *hard power*. Meningkatnya peran aktor transnasional menjadi sangat besar dalam perkembangan diplomasi modern. Dampak perkembangan teknologi terhadap diplomasi sangat besar, sistem baru memudahkan para aktor melakukan pertukaran informasi. Munculnya isu-isu baru merupakan hal wajar karena dunia sedang megalami globalisasi. Isu-isu global harus dapat dikuasai oleh negara melalui para diplomat agar dalam mendapatkan kepentingan negaranya lebih mudah (Natalia, 2016, hal.5-6).

Aktor-aktor hubungan internasional, khususnya negara, memerlukan kekuatan atau *power* yang dapat digunakan mempengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. *Power* yang diwujudkan melalui dua cara pertama diasosiasikan dengan *hard power*, sedangkan yang diwujudkan melalui daya tarik, menurut Joseph S. Nye dikategorikan sebagai *soft power* (Nye, 2008).

Kebudayaan sebagai salah satu sumber utama *soft power* dibagi menjadi dua jenis, yakni *high culture*, seperti seni, literatur, dan pendidikan yang menarik perhatian elit tertentu serta *pop culture*, yang berfokus pada produksi hiburan massal (*massentertainment*) (Nye, 2005, hal.95). Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki *national interest* terhadap *soft power* untuk melakukan kerjasama demi kepentingan negaranya begitu pula terhadap kepentingan dunia, khususnya bagi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia yang sangat dibutuhkan saat ini. Tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara anggota tidak tetap PBB, Indonesia dapat menjadi aktor dan pelopor perdamaian dunia sebagaimana amanah konstitusional ... “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Hal ini dapat diwujudkan dari melalui berbagai cara seperti diplomasi dan kerjasama lainnya atau bahkan dengan “perang semesta”. Perang semesta yang dimaksudkan penulis adalah perang yang melibatkan semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan suatu tatanan negara yang aman dan damai dari ancaman luar negeri dan dalam negeri salah satunya melalui *soft power*.

Untuk menjalankan amanah tersebut, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak hanya mengenai isu luar negeri tetapi juga tantangan dari dalam negeri, seperti kesenjangan ekonomi, sosial dan ketidakadilan hukum; pemilihan kepemimpinan daerah dan nasional yang berdampak terhadap kohesi sosial (*hate speech, hoax*, politik identitas); kemajuan teknologi melalui penggunaan media sosial (debat kusir virtual, terjadinya defamasi). Berbagai fenomena tersebut menjadi pemicu terhadap konflik bahkan berujung tindakan kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan peristiwa yang tampak pada berbagai konflik sosial. Konflik etnik, agama, kelompok dan bahkan konflik dalam bentuk tawuran pelajar yang berbuntut pada perilaku kekerasan.

Perilaku kekerasan seperti ini sudah menjadi fenomena sosial dalam penyelesaian konflik. Ketimpangan (*deprivasi*), dominasi, dan sensitivitas kepercayaan, kelemahan *agent of sosial control* untuk menjalankan fungsinya

(mengantisipasi, mencegah, dan mengendalikan konflik dan faktor pemicu konflik), termasuk perkelahian antara dua orang dari golongan yang berbeda menjadi konflik terbuka antar golongan. Ketidakpuasan, kekecewaan, dan rasa frustrasi cenderung diselesaikan dengan aksi pengrusakan gedung, pembakaran, dan bahkan penganiayaan terhadap manusia. Hal ini menjadi suatu kondisi yang permisif bagi bangsa Indonesia (Wirutomo & Soemardjan, 2000, hal. 11). Tindakan kekerasan yang sudah menjadi fenomena sosial di Indonesia, menarik bagi para ahli sosial untuk melakukan kajian empiris. Karena tindakan kekerasan ini, tidak hanya berlangsung pada kelompok masyarakat secara umum tetapi juga sudah meramba masuk kedalam lingkungan masyarakat kampus dalam bentuk tawuran mahasiswa. Beberapa studi yang terkait dengan tindakan kekerasan dan konflik sosial di Indonesia, diantaranya; studi Trijono (2001) tentang konflik di Maluku, kemudian studi yang mengkaji tentang akar kekerasan; kronologis situasi; pola penyebaran, kecenderungan dan intensitas konflik kekerasan di Indonesia, kemudian kajian tentang konflik dan kekerasan komunal dan damai di Luwu Sulawesi Selatan (Dwia, 2005, hal. 7-9).

Sekalipun telah banyak studi yang dilakukan terhadap fenomena sosial dan kekerasan di Indonesia, tetapi fenomena sosial dan perilaku kekerasan di dalam kampus melalui konflik horizontal dan vertikal belum banyak yang melakukan, padahal fenomena ini telah terjadi dan menggejala. Perilaku kekerasan dalam bentuk tawuran mahasiswa, seringkali terjadi yang membawa dampak ketidaknyamanan dan keamanan di dalam kampus. Tindakan pembakaran dan pengrusakan gedung, penganiayaan, yang melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa, melalui tawuran mahasiswa antar kelompok, kelompok dengan fakultas, fakultas dengan fakultas perguruan tinggi dengan perguruan tinggi adalah bentuk nyata dari realitas fenomena konflik dan perilaku kekerasan.

Fenomena sosial dalam bentuk konflik sosial dalam kampus berupa tawuran mahasiswa, tentunya bertolak belakang dari manifestasi kampus sebagai institusi pendidikan dimana didalamnya terdapat diantaranya, orang-orang terpelajar (mahasiswa) atau biasa disebut masyarakat ilmiah (akademik), tetapi bukan berarti kelompok atau masyarakat ilmiah ini tidak terkontaminasi atau

terpengaruh dengan perilaku kekerasan, bahkan hampir setiap aksi demonstrasi selalu memunculkan perilaku kekerasan (*agresiveness*). Bahkan fenomena tawuran mahasiswa semakin marak dan sudah berlangsung cukup lama yang tentunya dapat mengganggu aktivitas akademik, citra kampus dan bahkan dapat menimbulkan sikap antipati masyarakat. Bunyamin Maftuh memandang bahwa perkelahian fisik secara massal yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa di perguruan tinggi merupakan masalah pelik bagi pendidikan di Indonesia (Maftuh, 2010, hal. 12).

Sebuah studi dilakukan oleh Jumadi tahun 2009 tentang “dinamika konflik sosial dalam bentuk tawuran mahasiswa yang berujung pada perilaku kekerasan yang terjadi di kota Makassar. Dalam studi tersebut, dihasilkan beberapa temuan bahwa perubahan fungsi konflik justru mengarah pada tindakan negatif, dengan munculnya prasangka sosial, diskriminasi, dominasi, sensitivitas kepercayaan, etnocenterisme di antara kelompok yang berbeda, meningkatkan situasi dan kondisi krisis dan konflik yang mengarah pada kecenderungan dari sikap konflik berubah menjadi perilaku destruktif. Kondisi dan situasi tersebut menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial antar mahasiswa yang berujung pada tindakan kekerasan. Disamping itu tidak berfungsinya secara efektif norma dan nilai yang mengikat antara pelaku dan aktor berpotensi konflik sosial ini berujung pada tindakan atau perilaku destruktif (Jumadi, 2009).

Selain itu, hasil penelitian Simanjuntak menyebutkan bahwa kasus tawuran di Sumatera Barat disebabkan oleh adanya kesalahpahaman dalam memaknai arti solidaritas yang sebenarnya (Simanjuntak, 2011). Pada tahun yang sama di Universitas Hasanuddin, kasus konflik “Black September” yang dimuat dalam koran identitas (No 757/ Tahun XXXVII/ Edisi Awal Oktober 2011:7), peristiwa “*Black September*” menjadi doktrin pada mahasiswa baru untuk membangun solidaritas dan semangat loyalitas terhadap fakultasnya masing-masing (Rahmatia, 2014). Kemudian Pratama juga menunjukkan temuan bahwa penyebab konflik antar kelompok mahasiswa Ambon dengan kelompok mahasiswa Sumba yang terjadi di Malang berupa masalah-masalah sepele seperti salah paham, saling ejek, dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 yang berdampak

pada pemulangan paksa terhadap kelompok mahasiswa Sumba ke daerahnya akibat salah satu mahasiswa kelompok Ambon meninggal dunia (Pratama, 2016).

Evolusi dari tangan kosong menjadi senjata tajam yang terjadi akhir-akhir ini makin menunjukkan betapa dunia tawuran antar pelajar dan mahasiswa adalah ancaman yang nyata. Menurut laporan Al Jazeera ada 130 pelajar yang nyawanya melayang karena tawuran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2017). Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat kasus tawuran di Indonesia meningkat 1,1 persen sepanjang 2018 (TEMPO.CO, Jakarta).

Selain hasil riset, penulis juga menghimpun data dari media online yang menunjukkan fenomena konflik mahasiswa di beberap daerah di Indonesia diantaranya, 1) Konflik yang melibatkan ratusan mahasiswa FISIP dan Fakultas Teknik Universitas Riau. Mahasiswa Teknik diduga konvoi setelah wisuda, sementara bagi mahasiswa FISIP, kegiatan konvoi mengganggu perayaan kelulusan tersebut. Hal itu diduga kuat penyebab pecahnya konflik (5/10), Pekanbaru-Republika.co.id,; 2) Mahasiswa asal Manggarai yang kuliah di Malang, Jawa Timur, terlibat tawuran yang menyebabkan satu orang tewas (14/11/2015), Beritajatim.com. 3) Dua mahasiswa tewas dalam tawuran antara dua perguruan silat warga Timor Leste di kawasan Klampis Semalang, Surabaya, Jawa Timur, (9/10/2013), Surabaya-kompas.com; 4) Sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila (UP) Jakarta Selatan terlibat aksi tawuran di dalam kampus dengan melakukan aksi anarkis yang menyebabkan satu mobil terbakar (9/10/2015), Jakarta-Antanews; 5) Dua kelompok mahasiswa luar pulau tawuran di depan Universitas Kanjuruhan Malang (UNIKAMA), dua kelompok saling lempar batu dan membawa senjata tajam jenis parang (20/8/2015), malangvoice; 6) sejumlah mahasiswa dari dua jurusan di Fakultas Teknik, yakni Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) bentrok karena aksi saling ejek (23/9/2016), Sindonews.co.

Tidak hanya di beberapa daerah tersebut, di kota Gorontalo juga mengalami hal demikian, di kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kekerasan dalam bentuk destruktif juga terjadi. Pada tahun 2009, Tawuran antar mahasiswa dipicu oleh olok-olok mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan

Kependidikan (FIKK) terhadap mahasiswi dari Fakultas Teknik (Tempo.co). Kemudian pada tahun 2011 tawuran antara mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Pertanian berujung pada pembakaran gedung Fakultas Ilmu Pertanian UNG dan puluhan mahasiswa mengalami luka-luka. Akhirnya ada beberapa diantara mahasiswa mendapatkan sanksi akademik berupa *dropped out* (dikeluarkan) (kompas.com; tribunnews; republika). Selanjutnya pada tahun 2014, aksi tawuran terjadi antarmahasiswa Fakultas Teknik dengan Fakultas Kesehatan dan Olahraga UNG. Mereka saling serang dengan menggunakan batu, serta senjata tajam (sajam) (sindonews.com). Selang berapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2017, juga terjadi bentrok antara aktivis mahasiswa dengan pihak kepolisian yang dipicu karena penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada aktivis mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi (Mimoza TV).

Sementara itu, di Jurusan PGSD Universitas Negeri Gorontalo juga tidak luput dari konflik dan kekerasan mahasiswa. Pada tahun 2012, mahasiswa meninggalkan Dosen dalam ruangan kuliah pada saat pembelajaran sedang di mulai, akibat dari perlakuan oknum Dosen merubah sistem perkuliahan (waktu, hari dan pertemuan dirapel 3-4 kali pertemuan) dalam satu hari. Akibatnya proses perkuliahan menjadi bermasalah. Pada tahun 2013 dan 2014, konflik antar oknum pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dalam Musawarah Besar HMJ PGSD karena adanya perbedaan pendapat yang berlebihan dari setiap kubuh dalam menyampaikan gagasannya. Pada tahun yang sama (2014), terjadi konflik antara oknum dosen dengan oknum mahasiswa, bermula dari gaya mengajar dari oknum Dosen yang kerap menggunakan kalimat "kasar" dan *stereotype* kepada mahasiswa, tidak suka cara dan gaya mengajar dosen, mahasiswa protes hingga terjadi pertengkaran dan pemukulun dosen kepada mahasiswa. Sementara pada tahun 2015 terjadi kekerasan senior terhadap junior (mahasiswa baru) pada saat masa orientasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh HMJ mengakibatkan beberapa mahasiswa baru mengalami tindakan kekerasan. Pada tahun 2016, teridentifikasi beberapa kasus konflik dan kekerasan diantaranya: 1) kekerasan verbal berupa *stereotype* oleh oknum dosen terhadap mahasiswa yang berasal dari etnis tertentu, mengakibatkan mahasiswa mogok kuliah; 2) konflik antara oknum dosen dan

oknum mahasiswa semester V (pengurus HMJ) sehingga hampir terjadi perkelahian, hal ini dipicu dari protes mahasiswa yang berlebihan karena mendapat teguran dari oknum dosen karena tidur di sekretariat HMJ; 3) konflik antara oknum mahasiswa semester VIII dengan oknum mahasiswa semester VI. Konflik di picu karena ketersinggungan dari salah satu pihak karena diduga menertawai penampilan yang berujung pada kekerasan verbal; 4) konflik antara oknum mahasiswa semester akhir dengan oknum mahasiswa baru. Konflik di picu karena mahasiswa semester akhir merasa senior meminta mahasiswa baru untuk mengambilkan air minum, namun oknum mahasiswa menolak sehingga terjadi perkelahian (diolah dari sumber primer).

Beberapa data tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa masih kerap melakukan tindakan diluar nalar dan akal sehat sehingga terjadi konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Jika mengkaji akar atau penyebab terjadinya konflik yang destruktif dikalangan mahasiswa kadang-kadang dipicu oleh hal yang berbeda-beda, dari hal yang sepele sampai dengan hal yang lebih mendalam. Konflik itu misalnya dimulai dari saling mengejek, membela teman yang mempunyai masalah pribadi dengan jurusan, fakultas atau bahkan kampus yang lain, tradisi permusuhan turun temurun dan pemalakan. Mungkin juga konflik tersebut disebabkan oleh adanya persaingan antar kampus atau kesenjangan sosial di antara mahasiswa. Karena para mahasiswa yang berkonflik tidak mampu untuk menyelesaikan secara konstruktif maka dapat berujung pada tindakan kekerasan yang destruktif yang mempunyai dampak negatif bagi mahasiswa tersebut baik secara fisik maupun psikis (Maftuh, 2008, hal. 12).

Mencermati temuan mengenai kekerasan yang dilakukan mahasiswa tersebut, maka dapat dimaknai bahwa kekerasan dapat berupa defensif dan destruktif, fisik dan psikis bahkan simbolik, dengan demikian dapat dikatakan beberapa hal mengenai kekerasan. Kekerasan bukan realitas yang jauh dari hidup manusia. Kekerasan adalah fakta yang menghiasa perjalanan setiap individu. Tidak ada seorangpun yang bisa melepaskan diri dari tindakan destruktif itu. Selain itu, kekerasan sebenarnya tidak hanya bersifat deskriptif (menceritakan), tetapi juga preskriptif (menunjukkan). Dalam upaya untuk membongkar kekerasan

yang mencuat dalam diri manusia tendensi deskruksi dalam diri manusia menjadi kenyataan justru ketika manusia tidak menghidupkan rasionalitasnya dan tidak mengakui dirinya sebagai subjek yang bebas dan memiliki rasa kemanusiaan. Dengan kata lain, kekerasan adalah wujud dari kehampaan akan eksistensi diri sebagai subjek yang bertanggung jawab. Di balik penegasan ini sebenarnya ada cita-cita mendalam, yaitu agar manusia menghidupi dunianya sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia. Di sini, setiap individu bukanlah boneka pasif yang dihalangi oleh faktor-faktor yang determinasi. Ia adalah individu yang aktif dan produktif serta memiliki orientasi kemanusiaan. Kehadirannya sangat penting untuk membuka jalan dan memberi arah bagi kehidupannya yang lebih manusiawi. Kesadaran inilah yang perlu ditanamkan dan dikembangkan melalui pendidikan (Galtung, 2003, hal. 22-26). Selain itu, Bunyamin Maftuh berpandangan bahwa sesungguhnya konflik pada hakekatnya selalu ada dalam kehidupan masyarakat sementara kekerasan merupakan hal yang berbeda. Konflik pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tepat tanpa melakukan kekerasan, sehingga diperlukan adalah menumbuhkan kesadaran dan memberikan kemampuan pada generasi muda tentang resolusi konflik atau upaya penyelesaian konflik yang konstruktif dan damai (Maftuh, 2008, hal.10). Karenanya, melalui program pendidikan yang memadai di perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif dan damai dengan menjunjung tinggi humanisme, moralitas, kedisiplinan, keadilan, kebersamaan, kesetaraan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berperilaku sehari-hari. Pembudayaan ini hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki kekuatan dan daya adaptif yang dibangun dari esensi kedamaian.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal dipandang sebagai pintu gerbang untuk melaksanakan tugas pengembangan budaya damai bagi mahasiswa, maka perguruan tinggi harus memiliki kekuatan strategis untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan falsafah masyarakat. Mengapresiasikan falsafah masyarakat yang didalamnya menghargai pluralitas berarti terdapat ciri-ciri pendidikan yang berorientasikan kepentingan keberagaman. Apabila

pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilaksanakan, dengan sendirinya lahir kebudayaan perguruan tinggi yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat (Candra, 2012, hal. 4). Dengan demikian, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menggunakan sekaligus mengimplementasikan pendidikan yang mempunyai visi-misi untuk menghargai pluralitas, demokrasi dan humanisme. Namun ditengah harapan tersebut perguruan tinggi di Indonesia masih menyisahkan persoalan. Perguruan tinggi hingga kini masih dihantui oleh beragam kasus kekerasan yang berujung destruktif, seolah-olah menemukan jalan buntu. Perguruan tinggi yang mestinya menjadi wadah merayakan keberagaman baik dalam berpikir dan bertindak justru paradoks dengan kenyataan di lapangan. Sejumlah data tentang tawuran antar mahasiswa dan tindakan kekerasan yang destruktif masih mewarnai pemberitaan media. Fenomena ini menarik bagi para ahli pendidikan dan ilmu sosial untuk melakukan kajian empiris. Karena tindakan kekerasan ini, tidak hanya berlangsung pada kelompok masyarakat secara umum tetapi juga sudah meramba masuk ke dalam lingkungan kampus yang konon dikatakan masyarakat ilmiah.

Untuk mengantisipasi berulangnya kasus kekerasan dalam skala yang lebih besar, bahkan bisa terjadi berlarut-larut, diperlukan upaya pencegahan melalui studi perdamaian. Salah satu jalan untuk transformasi studi perdamaian adalah lewat pendidikan. Proses pendidikan menjadi sebuah upaya pembentukan dan pengembangan pelajar (siswa/mahasiswa) yang dapat mengembangkan diri pada dimensi intelektual, moral, dan psikologis mereka. Pendidikan yang dimaksudkan adalah sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi yang dibutuhkan oleh masyarakat modern pada saat sekarang ini. Sekolah dan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memberi arti bagi pelajar (siswa/mahasiswa) karena merupakan internalisasi dalam melakukan hubungan dengan sesama, sekaligus tempat untuk belajar, berinteraksi, bekerjasama, hidup berdampingan secara damai, saling memahami, menambah pengalaman hidup (*learning life together*) dalam situasi kemajemukan atau keanekaragaman. Zamroni mengemukakan, “*pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan untuk memberikan kesempatan pada pelajar untuk memahami kehidupan*

sehingga kelak bisa hidup layak dan berguna bagi diri dan keluarga dan juga masyarakat” (Zamroni, 2004, hal. 157). Kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah fenomena dimana selama ini kita beranggapan lembaga pendidikan adalah tempat untuk mencetak individu-individu yang memiliki moral dan mandiri di masa depan.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, perguruan tinggi harus benar-benar serius berupaya mencegah dengan mengarahkan pada perdamaian melalui peran semua pihak. Caranya adalah membawa salah satu isu yang mengarah pada terciptanya situasi yang kondusif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setidaknya, cita-cita besar dari proses penciptaan perdamaian lewat pendidikan, nantinya di masa depan tidak terjadi kasus yang selalu berulang, yaitu kekerasan. Apalagi kekerasan masih sering terjadi, pendidikan sebagai langkah prevensi dan upaya dalam membantu mahasiswa untuk mengembangkan dimensi intelektual, moral, dan psikologi dalam diri mereka.

Situasi kondusif harus berorientasi pada tema mengenai kedamaian di perguruan tinggi. Disebabkan perdamaian berkaitan dengan kenyamanan dalam belajar, jaminan akan keamanan dalam beraktivitas di perguruan tinggi, kehangatan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta kebebasan dalam berkreasi dan berkarya. Isu tersebut bisa diintegrasikan dalam pembelajaran yang positif dan konstruktif di semua mata pelajaran atau mata kuliah yang menyerukan kepada umat manusia yang ada di muka bumi untuk menyebarkan perdamaian.

Dalam konteks membangun budaya perdamaian harus ditumbuhkembangkan sebagai kebiasaan yang baik seperti nilai, sikap saling menghormati, adanya kebebasan bagi setiap orang, adanya sikap kepedulian, dan saling berbagi tanpa konflik. Kemudian apabila terjadi konflik harus dicari akar permasalahan dengan memprioritaskan cara-cara yang menguntungkan bagi semua. Berkaitan dengan cara-cara yang ditempuh efektif dan efisien untuk diberlakukan, yaitu bisa melalui dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang mengalami konflik.

Bagi UNESCO, pendidikan merupakan kunci utama pelopor pergerakan budaya kedamaian. UNESCO mengharapkan semua negara bisa mengambil

kebijakan dan tindakan yang mengarah kepada kegiatan kewarganegaraan yang demokratis dan memerhatikan hak-hak asasi manusia, baik di tingkat formal maupun nonformal (UNESCO, 1998, hal. 4). Untuk itu, jalan yang bisa ditempuh dalam upaya transformasi studi kedamaian adalah melalui proses pendidikan di perguruan tinggi.

Mengacu pada pandangan dan konsep yang dikemukakan di atas, konsep pendidikan kedamaian mempunyai relevansi makna dan fungsi yang tepat dikembangkan di perguruan tinggi. Penulis berpandangan bahwa nilai cinta damai dan antikekerasan menjadi penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam ini. Sebab prinsip-prinsip dasar pendidikan kedamaian mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep damai agar melahirkan perilaku sosial kondusif, kearifan sosial, kearifan budaya dan kearifan moral atau akhlak adalah melalui pendidikan kedamaian.

Dalam beberapa penelitian yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli dan akademisi telah banyak disimpulkan tentang kekuatan pendidikan kedamaian dapat menekan dan mencegah kekerasan pada sebuah tatananan masyarakat yang memiliki keberagaman sehingga berpotensi terjadi tindakan kekerasan atau konflik, termasuk dalam literatur penelitian Internasional. Menurut International\ Peace Research Association (IPRA), dalam konferensi yang ke-17 di Durban, Afrika Selatan, pada tanggal 23 Juni 1998, dinyatakan bahwa pendidikan kedamaian adalah proses memberdayakan orang dengan kecakapan, sikap dan pengetahuan (*skills, attitudes, and knowledge*) untuk: (1) Membangun, memelihara dan memperbaiki hubungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia (*to build, maintain, and restore relationships at all levels of human interaction*); (2) Mengembangkan pendekatan-pendekatan positif terhadap cara

untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat internasional; (3) Menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi yang mengayomi semua individu; (4) Menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia; (5) Membangun sebuah lingkungan yang lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan (IPRA, 1998).

Mengingat pentingnya masalah kedamaian di sekolah, pada tahun 2000 Majelis Umum PBB mengeluarkan mandat kepada UNESCO untuk menetapkan bahwa tahun 2000 sebagai tahun budaya damai internasional (*International Year for the Culture of Peace*) dan dekade tahun 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya damai dan tanpa kekerasan (*International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World*). *on Education for Peace, Human Rights and Democracy* yang ditetapkan di Paris pada tahun 1995 serta penetapan dekade *the Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education* yang dimulai dari 1995 sampai tahun 2005. Semenjak ditetapkan, berbagai macam program mulai dilakukan pada berbagai negara yang memusatkan pada pendekatan holistik yang menekankan pada metode partisipatif masyarakat terutama siswa di sekolah. Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan antikekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*). Penetapan dekade 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya damai antikekerasan tersebut merupakan kelanjutan dari program berkesinambungan yang dimulai semenjak tahun 1974 mengenai *Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms* yang ditetapkan di Paris, *World Plan of Action on Education for Human Rights and Democracy* yang ditetapkan di Montreal pada tahun 1993, *Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights* yang ditetapkan di Wina pada tahun 1993, *Declaration and Integrated Framework of Action* (Hadjam & Widhiarso, 2003).

Ada juga beberapa hasil penelitian mengenai pendidikan kedamaian di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Sukender tahun 2011 mengenai pendidikan kedamaian bagi anak-anak korban konflik di salah satu Pondok Pesantren, meskipun tidak secara eksplisit Pondok Pesantren Latansa melakukan pendidikan kedamaian bagi santri-santrinya, khususnya bagi mereka yang berlatar belakang konflik, namun sistem yang diberlakukan dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan di Pondok Pesantren Latansa memiliki beberapa unsur yang dapat ditemui dalam teori-teori pendidikan kedamaian, seperti; pengelolaan keragaman, keadilan gender, pengelolaan emosi (kesabaran), dan yang lainnya. Sistem pendidikan yang dilakukan pondok tersebut juga bisa dikategorikan sebagai pendidikan karakter, yaitu karakter kedamaian. Hal ini membuat para santri, khususnya yang berasal dari Papua dan Maluku bisa terbebas dari trauma, tidak membawa dendam dalam hidup, dan mampu menjadi manusia yang mencintai perdamaian (Sukendar, 2011)

Studi lain yang dilakukan oleh Farida Ariyani, dkk tahun 2010, menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan damai dan hak asasi manusia (PD-HAM) efektif mencegah kekerasan di sekolah. Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan mengambil sampel beberapa sekolah dasar (SD) yang menunjukkan bahwa model PD-HAM yang dikembangkan memiliki kelayakan (*feasibility*), ketepatan (*accuracy*), dan kegunaan (*utility*). Atau dengan kata lain model PD-HAM ini *acceptable* untuk digunakan secara terintegrasi pada pelajaran PKn di sekolah dasar untuk mencegah kekerasan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PD-HAM yang diintegrasikan melalui mata pelajaran PKn efektif untuk mencegah kekerasan di sekolah (Aryani, 2012).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu bidang kajian yang dapat menjadi wahana bagi pendidikan kedamaian adalah **pendidikan kewarganegaraan**. Sebagaimana yang dilakukan di Kanada pada saat merespon permintaan Direktur Jenderal UNESCO untuk informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Negara anggota untuk menerapkan Deklarasi dan Kerangka Aksi Terpadu tentang Pendidikan untuk Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1995.

*The 1995 Declaration and the Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy are not well known in Canada, but the principles they express are important elements of education policy, both in formal school systems and in many areas of non-formal education. Despite many pressures for a "back to basics" style of education in Canada's formal education systems, policy-makers, researchers, and teachers continue to develop **citizenship education** curricula and to integrate peace, human rights, and global education into school programs (Exchange, 2001, hal. i)*

Kutipan tersebut dapat dimaknai bahwa meskipun Deklarasi dan Kerangka Aksi Terpadu Pendidikan untuk Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang tidak begitu dikenal di Kanada, tetapi prinsip-prinsip yang mereka tingkatkan adalah elemen penting dari kebijakan pendidikan, baik dalam sistem sekolah formal dan banyak bidang pendidikan non-formal. Meskipun banyak tekanan untuk "kembali ke dasar" gaya pendidikan dalam sistem pendidikan formal Kanada, pembuat kebijakan, peneliti, dan guru terus mengembangkan kurikulum **Pendidikan Kewarganegaraan** dan untuk mengintegrasikan perdamaian, hak asasi manusia, dan pendidikan global ke dalam program pendidikan formal.

Sama halnya yang dilakukan di negara Vietnam. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Melissa H dkk, 2008 yaitu Mengembangkan kurikulum pendidikan kedamaian untuk sekolah dasar di Vietnam. Salah satu hal yang diungkap dalam penelitian tersebut sebagaimana yang dikutip oleh penulis sebagai berikut:

*...There were also 18 profiles of Nobel Peace Prize laureates and other figures of non-violence, and nine detailed grade 5 homework sheets. Use of the eight peace keys meant that the Teaching Manual is also able to fit into established curricula. It is able to connect with other activities and themes across the curriculum including in subjects such as **civics**, science, geography and music... (Conley, Bretherton, Halafoff, & Nietschke, (2008)*

Begitu pula dengan pandangan Federico Mayor dalam suatu petikan tulisannya yang mengungkap bahwa:

In fact, two out of the four pillars of education suggested by the Dolor report, namely learning to live together and learning to be, are related to peaceful living. What matters is integrating peaceful attitudes, values, and

*skills into the teaching and learning process in school and makes it a part of the total curriculum. Certain countries and institutes have it in the form of subjects such as Values Education, (Malaysia and Philippines), **Citizenship Education** (U.S.A.). Education for Mutual Understanding (Ireland) and Developmental Education (UNICEF). Apart from such subject names it can be integrated into the formal curriculum and co-curriculum of school (Balasooriya, 2001, hal.5).*

Beberapa hasil penelitian dan pandangan para ahli menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang studi yang tepat untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang ilmu *social studies* memiliki peran strategis dalam membangun dan mengembangkan warga negara yang cinta akan kedamaian dan anti pada kekerasan yang merupakan bagian dalam membentuk warga negara demokratis dan bertanggungjawab.

Namun jika mencermati kebijakan kurikulum atau sistem pendidikan di beberapa negara dalam menyikapi program pendidikan kedamaian dengan berbagai pendekatan telah tersebar secara luas pada lingkungan sekolah, salah satunya dengan mengintegrasikan pada bidang kajian *civics/civic education/citizenship education*. Namun harus diakui masih kurang menyentuh lingkup perguruan tinggi, sama halnya di Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam sistem pendidikan di Indonesia, program pendidikan kedamaian baru fokus pada lingkup sekolah/pesantren sementara pada lingkup perguruan tinggi secara eksplisit belum terdapat program secara komprehensif atau program khusus seperti diintegrasikan pada mata kuliah.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran dan mata kuliah yang diajarkan disemua jenjang dan jenis sekolah/perguruan tinggi secara pragmatik memiliki *psyco-pedagogis*, yaitu membina warga negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga pendidikan fomal maupun formal, Sapriya dan Winataputra (2010, hal. 12), menyatakan bahwa tugas PKN dengan paradigma barunya mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga

negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional. Termasuk PKn dalam kurikulum perguruan tinggi seperti mata kuliah Pancasila, PKn, Konsep Dasar PKn, Pembelajaran PKn SD.

Beberapa mata kuliah PKn di perguruan tinggi dengan paradigma baru mengamanatkan, agar demokrasi dilaksanakan secara cerdas dan berbudaya. Jadi, bukan demokrasi yang dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak tanpa dikemas dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Apabila demokrasi diterjemahkan dengan cara destruktif, intimidatif dan tidak menggunakan akal sehat, maka akan terjadi anarkisme sehingga menyalahi nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan tujuan pembelajaran pada beberapa mata kuliah tersebut.

Menurut pandangan penulis, beberapa mata kuliah PKn di perguruan tinggi dapat menjadi wahana pengembangan model pendidikan kedamaian yang tidak hanya menanamkan pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, respek dan toleransi, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban dan multikultural bagi mahasiswa. Pendidikan kedamaian diharapkan dapat mendukung pengembangan demokratis yang tengah tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang multi etnis, suku bangsa, budaya, agama, ekonomi, politik untuk menuju masyarakat madani Indonesia atau Indonesia baru yang dicita-citakan yang mampu membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran demokratis.

Proses ini merupakan upaya menumbuhkembangkan potensi mahasiswa sebagai warga negara yang menuntut kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) (Branson, 1998). Melalui kompetensi yang dimiliki mahasiswa sebagai warga negara, dapat mencerminkan karakter cinta damai dan antikekerasan.

Berdasarkan pengamatan, observasi dan kajian pustaka (hasil riset dan pelatihan), penulis memandang bahwa sejauh ini para akademisi, ahli dan

penggiat pendidikan kedamaian lebih banyak memfokuskan program pendidikan dan pelatihan di sekolah sebagai tahapan awal dalam meletakkan dasar nilai kedamaian pada anak sedini mungkin. Namun penulis memandang bahwa program pendidikan kedamaian di perguruan tinggi harus segera dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan beriringan dengan pengembangan pendidikan kedamaian yang tengah berjalan di sekolah. Hal ini menjadi krusial mengingat konflik dan kekerasan mahasiswa masih kerap terjadi dan pentingnya menyiapkan mahasiswa sebagai duta perdamaian di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya mengembangkan karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa dan belum adanya pengembangan program pendidikan kedamaian di perguruan tinggi yang memadai, maka penulis memandang pentingnya melakukan penelitian pengembangan model pembelajaran pendidikan kedamaian melalui mata kuliah Konsep Dasar PKn di perguruan tinggi.

1.2 FOKUS MASALAH PENELITIAN

Program pendidikan kedamaian idealnya dilakukan secara holistik, menekankan pendekatan holistik untuk pendidikan kedamaian yang bisa berlaku untuk pendidikan masyarakat, sekolah dasar dan menengah, serta ruang kelas kuliah. Harris juga menekankan bahwa pendidikan kedamaian harus integral dalam setiap upaya untuk mengajarkan tentang kedamaian. Bahan utama dari pedagogi tersebut, yaitu pembelajaran kooperatif, masyarakat demokratis, kepekaan moral, dan berpikir kritis. Olehnya itu, pendidikan kedamaian dapat diperkenalkan sebagai subjek yang terpisah, tersebar di kurikulum, atau menjadi pendekatan sekolah/perguruan tinggi secara menyeluruh. Tentu, pendekatan yang lebih holistik, yang seharusnya dipilih (Harris, 2004).

Ada beberapa cara mengintegrasikan pendidikan kedamaian ke dalam kurikulum. Jika seorang pendidik perdamaian ingin mengintegrasikannya ke dalam semua aspek sekolah/perguruan tinggi. Ada beberapa media utama integrasi ke dalam kurikulum:

- a) Konteks subjek. Dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran Bahasa, Studi Sosial, Agama, Pendidikan Jasmani, Seni, dan Sains sebagai mata pelajaran inti kurikuler, yang dapat digunakan untuk menanamkan kedamaian;
- b) Perspektif mata pelajaran. Dapat diintegrsikan melalui peran pendidik agar subjek menjadi bermakna. Subjek tidak belajar hanya untuk kepentingan subjek sehingga harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pengembangan diri, sosial, emosional, intelektual dan moral pelajar. Pendidikan perdamaian berusaha memanusiawikan subjek dengan membawa perspektif manusia dan kekuasaan efektif dalam pembelajaran;
- c) Metode pengajaran. Dalam pendidikan, apa yang diajarkan dan bagaimana itu diajarkan adalah sama pentingnya. Seorang pendidik yang baik mengadopsi pendekatan pendidikan yang berpusat pada pelajar. Alih-alih mengajar secara rutin, dia menggunakan kegiatan belajar yang menarik. Dia tidak hanya peduli dengan menanamkan pengetahuan tetapi juga peduli dengan mengembangkan keterampilan bersosialisasi, sikap moral dan keterampilan belajar secara paralel;
- d) Kegiatan ko-kurikuler. Dapat diintegrasikan melalui kegiatan yang dilakukan di luar kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran formal. Kegiatan ekstra kurikuler bersifat komplementer dalam arti bahwa mereka tidak secara langsung berhubungan dengan mata pelajaran atau kurikulum formal, tetapi sangat membantu dalam mencapai tujuan pendidikan kedamaian;
- e) Pengembangan staf pengajar. Agar berhasil menerapkan inovasi apa pun, pertama-tama para pendidik perlu mengembangkan dengan meningkatkan kesadaran dan pelatihan. Ini dapat dilakukan melalui seminar dalam-layanan dan sesi-sesi berbasis sekolah;
- f) Pengelolaan ruang kelas. Pengelolaan kelas termasuk pemeliharaan disiplin, pengorganisasian pembelajaran, pembentukan karakter, resolusi konflik, konseling, dll;
- g) Manajemen Sekolah/Perguruan tinggi. Ini adalah level administrasi, struktural, pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan pimpinan. Pendidik yang menerapkan pendidikan kedamaian di tingkat kelas membutuhkan dukungan

dari seluruh sekolah/ perguruan tinggi. Pendidikan Kedamaian memberikan wawasan penting dalam pengembangan manajemen sekolah/ perguruan tinggi (Balasooriya, 2001, hal. xiii-xiv).

Tidak jauh berbeda dengan media yang diungkapkan di atas, Bjerstedt juga mengungkapkan berbagai cara mengintegrasikan pendidikan kedamaian ke kurikulum sekolah/ perguruan tinggi diantaranya: (1) pendidikan perdamaian dapat dijadikan subjek khusus, pendekatan monocurricular, (2) isu-isu yang terkait dengan perdamaian dapat ditangani melalui upaya-upaya khusus di luar sistem normal kelas, pendekatan acara ekstrakurikuler atau khusus; (3) pendidikan perdamaian dapat dilihat sebagai tugas umum untuk beberapa atau semua mata pelajaran sekolah/ perguruan tinggi, pendekatan lintas-kronik, atau (4) pendidikan perdamaian dapat dilihat sebagai bertujuan pendidikan untuk nilai-nilai perdamaian dan interaksi non-kekerasan dengan orang lain (Bjerstedt, 1993, hal.5)

Sementara jika dilakukan secara terbatas, pendidikan kedamaian dapat diajarkan melalui mata pelajaran/mata kuliah yang ada seperti Geografi, Sejarah, Pemerintah, Kewarganegaraan dan Ilmu Sosial. Strategi pengajaran seperti Strategi Pembelajaran *Advance Organizers* dan Inkuiri Penyelidikan Terbimbing seperti pemetaan konsep; inkuiri yurisprudensial; inkuiri sosial; bermain peran; diskusi; *story telling*; narasumber; pembelajaran kooperatif dan debat. Ketika metode yang tepat digunakan dalam pengajaran, pencapaian tujuan kemungkinan akan direalisasikan. Bahan sumber belajar seperti pemutaran video, koran, gambar dan informasi komputer juga akan memungkinkan pelajar memahami secara mendalam efek perang dan keuntungan dalam koeksistensi damai dengan orang lain (Odejobi & Adesina, 2009).

Beberapa alternatif media dan cara yang dapat digunakan dalam mengintegrasikan pendidikan kedamaian ke dalam kurikulum tersebut, penulis memilih beberapa cara seperti konteks subjek yaitu memilih mata kuliah, perspektif subjek belajar, dan pengelolaan kelas yang mencerminkan pendidikan kedamaian dengan menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada mahasiswa yaitu model inkuiri yurisprudensial berbantuan model *role playing*. Hal ini dilakukan mengingat pendekatan holistik memerlukan waktu yang cukup

lama dan cakupannya sangat luas sehingga pada konteks penelitian ini masih dibatasi pada proses pembelajaran yang dilakukan melalui mata kuliah Konsep Dasar PKn berbasis Pendidikan Kedamaian melalui model pembelajaran inkuiri yurisprudensial. Dengan demikian PKn yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mata kuliah Konsep Dasar PKn sementara Pendidikan Kedamaian merupakan pedagogi yang meliputi penggunaan media, metode, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran yang mencerminkan pendidikan kedamaian yang dioperasionalkan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, tujuan dan kemampuan yang hendak dicapai juga menggunakan konsep pendidikan kedamaian yang berdasar pada topik, tujuan dan kompetensi Konsep Dasar PKn. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah melakukan pengembangan pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis inkuiri yurisprudensial melalui mata kuliah Konsep Dasar PKn yang tercermin pada perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran.

Untuk melakukan pengembangan model pembelajaran tersebut, penulis akan mengawali penelitian dengan melakukan kajian tentang kompetensi mahasiswa dan menganalisis kebutuhan pendidikan kedamaian melalui mata kuliah Konsep Dasar PKn dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang cinta damai dan antikekerasan. Pada studi pendahuluan, kajian dimaksudkan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis kebutuhan pembelajaran Konsep Dasar PKn secara akademis dan kurikuler khususnya pada proses pembelajaran di kelas sehingga mampu menemukan konsep dan strategi implementasi melalui pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kedamaian melalui mata kuliah Konsep Dasar PKn di Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (PGSD FIP UNG). Setelah itu, penulis melakukan pengembangan model untuk menemukan model hipotetik yang kemudian diuji keefektifannya dalam meningkatkan karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa.

Perguruan tinggi yang menjadi objek kajian dalam penelitian yakni di Jurusan PGSD FIP UNG. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki kurikulum yang memprogramkan mata kuliah

Konsep Dasar PKn di Jurusan PGSD sebagai mata kuliah wajib. Selain itu, mahasiswa relatif heterogen dilihat dari segi suku, agama, tingkatan sosial dan ekonomi. Begitu pula riwayat dan potensi terjadinya perilaku kekerasan mahasiswa sehingga sesuai dengan fokus kajian yang hendak diteliti oleh penulis.

1.3 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Penelitian ini hendak mengkaji pengembangan model pembelajaran pendidikan kedamaian berbasis inkuiri yurisprudensial dalam proses belajar mengajar mata kuliah Konsep Dasar PKn. Untuk itu, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengembangan model pembelajaran pendidikan kedamaian berbasis Inkuiri yurisprudensial terhadap karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa? Untuk mempermudah penulis dalam meneliti, pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi sub permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembelajaran pendidikan kedamaian untuk mengembangkan karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa yang selama ini ada di perguruan tinggi, khususnya pada Jurusan PGSD FIP UNG?
2. Bagaimana desain model pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurisprudensial untuk meningkatkan karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa PGSD FIP UNG?
 - a. Bagaimana desain perencanaan pengembangan model Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurisprudensial di Jurusan PGSD FIP UNG?
 - b. Bagaimana desain pelaksanaan pengembangan model Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurisprudensial di Jurusan PGSD FIP UNG?
 - c. Bagaimana desain evaluasi pengembangan model Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurisprudensial di Jurusan PGSD FIP UNG?
3. Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurisprudensial terhadap karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa Jurusan PGSD FIP UNG?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum penelitian adalah efektivitas pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurispudensial dalam meningkatkan karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh gambaran praktek pembelajaran pendidikan kedamaian untuk mengembangkan karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa yang selama ini ada di perguruan tinggi, khususnya pada Jurusan PGSD FIP UNG.
2. Menyusun dan menghasilkan desain konseptual pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurispudensial meliputi desain perencanaan, desain pelaksanaan dan desain evaluasi pembelajaran.
3. Mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurispudensial terhadap karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa

1.5 MANFAAT/SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis kebijakan, praktis maupun segi isu dan aksi sosial, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membangun ide dan konsep-konsep dasar tentang kebutuhan pendidikan kedamaian secara kurikuler sehingga di diharapkan menghasilkan dalil-dalil dan prinsip pengajaran pendidikan kedamaian dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran/mata kuliah dengan pendekatan terpadu. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan model pendidikan yang lebih memperhatikan kebutuhan pebelajar, baik secara akademik maupun sosio-kultural. Model pembelajaran yang dihasilkan menjadi bagian dari inovasi pendidikan di Indonesia khususnya pengembangan model pendidikan kedamaian di perguruan tinggi.

1.5.2 Manfaat Kebijakan

Bagi pengembang kurikulum dan pengambil kebijakan di perguruan tinggi khususnya pada kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi dapat mengamanatkan pemerintah mematangkan kebijakan yang terkait dengan sosialisasi dan penyiapan pendidikan kedamaian di perguruan tinggi dengan mengintegrasikan pada mata kuliah Konsep Dasar PKN yang saat ini menjadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi LPTK di Indonesia khususnya pada jurusan/prodi PGSD. Disamping itu, dapat pula diintegrasikan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

1.5.3 Manfaat Praktik

Signifikansi praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis oleh beberapa pihak, diantaranya adalah: *pertama, kepada* dosen dan pimpinan di lingkungan perguruan tinggi, hasil penelitian ini mendorong untuk mengimplementasikan program pendidikan kedamaian secara kurikuler mulai dari desain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sehingga dapat dilakukan secara komprehensif. *Kedua*, hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang hendak mengkaji pengembangan model pendidikan kedamaian di perguruan tinggi dan atau di sekolah.

1.5.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial

Kepada mahasiswa, sejumlah sikap, keterampilan dan pengetahuan yang mencerminkan mahasiswa yang cinta damai dan antikekerasan di ungkapkan pada penelitian ini, dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk mematangkan fungsi mahasiswa sebagai *agen of change, social of control and moral force* di perguruan tinggi yang bermuara pada peran mahasiswa sebagai duta perdamaian bagi lingkungan sekitarnya. Sejumlah pengalaman belajar yang dialami mahasiswa menjadi bekal bagi mereka untuk melakukan aksi sosial yang lebih teroganisir dan berkelanjutan. Kepada dosen, pengalaman mengajar dengan menggunakan pedagogi pendidikan kedamaian dapat dijadikan bahan untuk

melakukan beragam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait dan komunitas atau lembaga sosial yang menaruh perhatian terhadap pengembangan pendidikan kedamaian di lingkungan sekolah, perguruan tinggi dan lingkungan sosial masyarakat.

Sejumlah signifikansi penelitian yang diharapkan penulis merupakan gambaran harapan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika hasil penelitian ini dapat didiseminasikan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), diyakini dapat berdampak lebih luas bagi penyiapan generasi muda yang mampu mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Melalui sejumlah sikap, keterampilan dan pengetahuan yang tercermin pada karakter cinta damai dan antikekerasan mahasiswa yang telah dikembangkan dan diuji keefektifannya, akan dapat melahirkan dan menyiapkan mahasiswa sebagai duta perdamaian di lingkungannya yang kini makin membutuhkan kemampuan menjaga perdamaian (*peace-keeping*), menciptakan perdamaian (*peace-making*) dan membangun perdamaian (*peace- building*). Untuk itu seruan kedamaian harus tetap digelorakan dan disemaikan agar kita mampu merasakan kedamaian hakiki yaitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai antar sesama manusia dan berdamai dengan semesta alam.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI DISERTASI

Pada bagian ini, penulis memberikan struktur organisasi penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini yang berkaitan tentang pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kedamaian berbasis Inkuiri Yurisdiksional dapat meningkatkan karakter cinta damai dan antikekerasan di Jurusan PGSD FIP UNG. Secara berurutan penelitian ini direncanakan menjadi lima bab. Tiap-tiap bab menjabarkan penjelasan yang mendalam. Bagian dari bab tersebut antara lain:

- 1) Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri latar belakang penelitian: dalam latar belakang ini penulis memaparkan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan data sehingga permasalahan ini layak untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah dibuat

dengan tujuan agar penelitian memiliki fokus dan penelitian lebih terarah dengan merumuskan masalah secara umum dan khusus dengan 4 item pertanyaan. Sementara dalam tujuan penelitian, penulis membagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Bagian terakhir pada bagian yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian memberikan gambaran bagaimana disertasi tersebut memberikan kebermanfaatan secara teoritis, praktis, aksi sosial maupun dari segi kebijakan.

- 2) Bab kedua berupa landasan teori yang mengkaji tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian disertasi yang terdiri dari kajian teori/pustaka dimana teori yang digunakan disesuaikan dengan kajian dalam disertasi dan digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dirujuk menggunakan berbagai sumber. Landasan teori mengkaji tentang konsep-konsep, teori-teori, serta berbagai hasil riset sehingga menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan yang dikaji oleh peneliti lain dijadikan dasar asumsi peneliti untuk memperkaya dan membandingkan penelitian yang diteliti oleh penulis. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya dijadikan pisau analisis dalam memperdalam temuan disertasi ini. Kemudian kerangka pemikiran meruapakan gambaran tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis dengan mengkaji hubungan teoretis-antarvariabel penelitian. Bagian terakhir pada bagian ini yaitu merumuskan hipotesis penelitian atau dugaan sementara yang dikemukakan penulis yang membutuhkan pengujian secara mendalam dalam penelitian ini.
- 3) Bab ketiga berupa metode penelitian yang membahas mengenai metode penelitian yang memberikan arahan serta gambaran kepada penulis tentang alur penelitian. Dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisis data penulis menggunakan beberapa pendekatan pendekatan serta metodologi penelitian.
- 4) Bab keempat berupa temuan dan pembahasan terdiri dari deskripsi lokasi penelitian yang menjadi objek dan subjek penelitian. Kemudian deskripsi hasil penelitian yang merupakan gambaran hasil data dan temuan penelitian

di lapangan baik pada studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian validitas empiris. Setelah itu, pembahasan temuan penelitian dengan melakukan analisis serta membahasnya dengan menggunakan teori, konsep dan hasil riset sebelumnya serta mengkaji dengan data-data yang mendukung dalam penelitian.

- 5) Bab kelima berupa simpulan, implikasi, rekomendasi dan dalil. Pada bab lima ini penulis memberikan kesimpulan, memaparkan implikasi dan memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak dan instansi terkait, kemudian terakhir memaparkan dalil yang dihasilkan dalam penelitian ini.